

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM
PENGENTASAN ANAK PUTUS SEKOLAH
(STUDI KASUS SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BATANG CENAKU
TAHUN 2011-2012)**

Rio Kusbowo

Email :riokusbowo@yahoo.com

Pembimbing :Drs.M.Y.Tiyas Tinov,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The problems of school dropouts is like dynamite for Indonesian that never be ended because the number of school dropout rates increases each year, as happened in Indragiri Hulu, especially in BatangCenaku. The numbers of school dropouts in elementary level amounted to 66 students from 4856 students in 2011 while in 2012 the numbers of schools dropouts increased to 188 students from 4951 students.A negative impact for the Indragiri Hulu if the problem can not be solved by the government of Indragiri Hulu. So the researcher formulates what factors are the causes of school dropouts at the elementary level in BatangCenaku? How are the efforts of local government of educational sector in the reduction of school dropouts in BatangCenaku?

This is a qualitative research. The location of this study is at the office of District Education of Indragiri Hulu, in Batang Cenaku. In collecting the data the researcher used purposive sampling technique. Purposive sampling is a technique that used particular consideration in collecting the data sample, for example, the person considered as most knowledgeable about what to expect, so it will be easier for researcher to explore objects and social situation investigated. To get the data, the researcher used the following methods: observation, interviews, and documentation. To describe the issues discussed, analyzing the data is needed to do.

According to the finding research the causes of school dropouts are the economy, family, school, peers, and academic ability. The efforts of the Government of Indragiri Hulu appropriate to authority possessed by the local government issued a policy of reduction of school dropouts in the form of movement compulsory education of villages based including updating data dropouts or no schooling children, socialization to the people, Assistance Fund, Optimizing Scholarship Education for poor people, and Education Pack Assistance Program.

Keywords: Authority, Dropouts, Education.

PENDAHSAULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk pada bidang pendidikan. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah, disatu pihak, membebaskan pemimpin pusat dari beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga dia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang bersamaan pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

Adapun fungsi pemerintah adalah fungsi pelayanan merupakan fungsi utama yang harus diperhatikan, dimana pemerintah

harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor, termasuk dalam bidang pendidikan. Fungsi pengaturan (*regulating*) pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah dan peraturan lainnya, termasuk fungsi regulasi dalam bidang pendidikan, fungsi pembangunan (*development*) merupakan fungsi yang dimana pemerintah melakukan tindak pembangunan agar tercapai pemerataan, dan terakhir fungsi pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat diberdayakan secara optimal agar tidak menjadi beban pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional bagian keempat Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah pasal 11 wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Pendidikan merupakan tiang kebudayaan dan fondasi utama untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Arti penting kesadaran pendidikan menentukan kualitas kesejahteraan sosial lahir batin masa depan. Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Dirasakan atau tidak, pendidikan merupakan faktor penting

dalam memartabatkan negara maupun meningkatkan kemajuan secara majemuk sebuah negara. Tanpa pendidikan, kemajuan sebuah bangsa akan semakin pudar tergerus oleh maraknya perkembangan zaman yang menuntut pemahaman keilmuan yang satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan taraf pendidikan tersebut.

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah guna memajukan peradaban dan tingkat kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia mendorong timbulnya berbagai permasalahan sosial yang kian hari semakin meresahkan bangsa Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah tingginya angka putus sekolah anak usia produktif (usia sekolah). Selain tingginya angka putus sekolah, rendahnya minat anak bahkan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dirasakan masih sangat kurang.

Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi satu alasan betapa rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia yang memang bila ditelaah lebih mendalam bukan hanya pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan tentunya para orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan untuk bekal hidup maupun sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Kelangsungan hidup bangsa kedepan berada ditangan anak-anak dimasa sekarang. Jika menginginkan kesenangan dimasa yang akan datang maka anak juga memperoleh haknya dimasa sekarang. Misalnya tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa, anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. Disamping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar hak-haknya tidak terabaikan.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, suatu daerah yang telah mengalami perkembangan pesat yaitu dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan dibidang pendidikan. Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah memiliki persoalan yang harus dihadapi yaitu pengentasan anak putus sekolah, karena masih banyaknya siswa di tingkat sekolah dasar yang mengalami putus sekolah, sedangkan program nasional dibidang pendidikan yaitu wajib belajar 9 tahun. Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan besar di bidang ekonomi, tapi masih adanya anak yang putus sekolah.

Diantara persoalan yang dihadapi pendidikan daerah sekarang adalah masih adanya anak yang putus sekolah, sedangkan pada saat ini SD dan SMP bebas biaya dan tidak ada pungutan biaya lain bahkan baju sekolah disiapkan oleh pihak sekolah. Inilah yang harus jadi

perhatian serius untuk pemerintah daerah, karena dana APBD terdapat 20 % untuk biaya pendidikan. Pada kenyataan di masyarakat tidak semua kebutuhan untuk anak terpenuhi. Salah satunya dibidang pendidikan. Didalam pendidikan terdapat banyak anak putus sekolah (formal). Keadaan lingkungan yang kurang mendukung, ekonomi, geografi, sosial ekonomi menjadi faktor penyebab anak putus sekolah. Penyebab anak putus sekolah di Kecamatan Batang Cenaku adalah kondisi ekonomi yang rendah, karena kondisi ekonomi yang rendah, sebagian anak yang putus sekolah lebih memilih membantu orang tua mereka bekerja. Penyebab lain anak putus sekolah yaitu kondisi geografis, jarak tempuh yang cukup jauh dan rusak saat musim hujan. Putus sekolah merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir seperti di Kabupaten Indragiri Hulu berikut ini.

Upaya yang sudah diberikan dari pemerintah pusat yaitu memberikan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga siswa dapat melanjutkan sekolah. Harapan dari pemerintah dengan adanya dana BOS dapat mengentaskan siswa putus sekolah, namun masih tercatat cukup banyak siswa yang putus sekolah. Faktornya adalah siswa tersebut kurang mampu dalam kegiatan belajar mengajar sampai akhirnya siswa tersebut tidak naik kelas lebih dari 2 tahun, sehingga menimbulkan patah semangat dalam melanjutkan pendidikan. Dan upaya dari pemerintah daerah Indragiri Hulu adalah mengadakan ujian paket A

atau setara dengan tingkat sekolah dasar, dan siswa yang putus sekolah dapat melanjutkan kependidikan selanjutnya. Upaya lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengentasan anak putus sekolah, tidak diharuskan melengkapi akta kelahiran kepada calon peserta didik tingkat sekolah dasar, hal tersebut merupakan upaya dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga dengan tidak adanya syarat yang memberatkan dan tidak dipungut biaya saat pendaftaran calon peserta didik, orang tua dapat mendaftarkan anak masuk sekolah. Dan apabila orang tua atau wali murid menemukan ada sekolah yang memungut biaya pada saat pendaftaran calon peserta didik dan meminta syarat akta kelahiran, agar melaporkan secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan fenomena yang ditemui dilapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Faktor-faktor apa saja penyebab anak putus sekolah tingkat sekolah dasar di Kecamatan Batang Cenaku?
- 2). Bagaimana upaya pemerintah daerah sektor dinas pendidikan dalam pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Batang Cenaku ?

Kerangka Teoritis

1. Kewenangan

Ramlan Surbakti mendefinisikan Kewenangan adalah kekuasaan.

Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini, hak moral yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan. (Ramlan Surbakti 2010: 108)

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan). Seperti dengan konsep kekuasaan, disini pun bermacam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya *An Analysis of Social Power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *power and society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. (Miriam Budiardjo 2009: 64)

Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi:

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu, merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, fasilitas dan perjanjian penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (pasal 30 keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 334).

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan SD.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan sekolah menengah.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
5. Melaksanakan pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga teknis pendidikan luar sekolah.
6. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan dinas pendidikan.
7. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap tugas-tugas pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu ini berdasarkan perundang undangan yang berlaku (pasal 30 keputusan

Bupati Indragiri Hulu Nomor. 334.) tersebut dikatakan bahwa fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu memfasilitasi penyelenggaraan Sekolah Dasar dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan dinas pendidikan serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap tugas-tugas pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan.

Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (hasbullah, 2009:1).

Menurut Nasution (1999;10-13) pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.

3. Putus Sekolah

Pengertian putus sekolah adalah berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (Salim 2002 : 793)

4. Faktor-faktor Anak Putus Sekolah

James conan dalam musfiquon, (2007 : 1) menjelaskan bahwa masalah putus sekolah ini memang menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan penerimaan siswa baru (PSB) dimulai. Pemberantasan anak putus sekolah terus dilakukan tetapi angka putus sekolah tetap tinggi. Masalah putus sekolah memang merupakan dinamit sosial. Meski ledakan putus sekolah telah ditekan, masalah putus sekolah tetap ada.

Umar Tirtarahardja mengemukakan bahwa manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari tiga lingkungan pendidikan yang utama yakni keluarga, sekolah dan masyarakat, dan ketiganya disebut tripusat pendidikan. Selanjutnya aspek-aspek akan dikemukakan secara lebih rinci karena akan dijadikan acuan dalam penelitian ini :

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena

hubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat terbentuk keluarga inti (*nucleus family*: ayah, ibu, dan anak), ataupun diperluas (di samping inti, ada orang lain : kakek/nenek, adik/ipar, pemabantu,dan lain-lain.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab anak putus sekolah dan tidak melanjutkan jenjang selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan finansial masyarakat (orang tua) keterbatasan finansial ini menyebabkan masyarakat tidak mampu memberikan solusi terhadap kondisi geografis yang ada (baik dalam arti jarak maupun sarana transportasi) untuk menyekolahkan anaknya disamping kewajiban orang tua untuk memenuhi biaya sekolah yang lain seperti uang spp dan uang jajan kesekolah).

Orang tua tidak memiliki dana cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang ditanggung. Dalam kehidupan yang serba kekurangan, orang tua mengharapkan anaknya bisa membantu bekerja, sekolah bukan merupakan prioritas bagi orang tua miskin, karena sekolah tidak dapat membantu mereka dengan segera.

c. Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi ini mencakup akuntabilitas siswa kesekolah, metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah,

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

d. Faktor Teman Sebaya

Teman sebaya adalah teman anak dalam kegiatan sehari-hari yang akan memberikan pengaruh terhadap belajarnya karena teman sebaya anak, lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Teman sebaya atau teman bermain yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri anak, begitu juga sebaliknya teman bergaul yang buruk pasti akan berpengaruh buruk juga.

e. Kemampuan Akademis

Rasa mampu yang rendah pada umumnya berada pada rendahnya keahlian dan kemampuan dalam banyak bidang. Rendahnya keahlian seseorang mengakibatkan kegagalan dalam mencoba sesuatu termasuk pendidikan sekolah, kegagalan itu menimbulkan atau menambah rasa tidak berdaya. Kebanyakan anak yang mempunyai kesulitan belajar adalah anak yang kurang memiliki rasa mampu. Mereka mengalami kesulitan dalam segala proses belajar sekalipun proses itu sudah di ulang-ulang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang bertujuan menggambarkan dan memahami secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena serta gejala yang diteliti yang berhubungan dengan realita di lapangan berdasarkan data atau informasi yang ada.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melihatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Cenaku. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di Kecamatan Batang Cenaku tercatat paling banyak siswa yang putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar dari pada Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2011-2012.

PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu serta Dinas/Instansi yang terkait beserta pembahasannya. Bab ini menguraikan tentang Analisis upaya Pemerintah Daerah dalam pengentasan anak putus sekolah. Berdasarkan data temuan hasil wawancara dan observasi di lapangan tentang upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengentasan anak putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu. Dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah.

Putus sekolah merupakan suatu kondisi dimana terhentinya proses pembelajaran secara formal sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya oleh sebab-sebab tertentu. Penyebab anak putus

sekolah dapat dilihat sangatlah beragam, berdasarkan data penelitian yang penulis ambil menunjukan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah :

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga adalah faktor internal penyebab anak putus sekolah yang sangat berpengaruh terhadap motivasi anak untuk bersekolah. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku orang tua untuk menyekolahkan anak mereka adalah faktor pendidikan, dimana pendidikan yang rendah menjadi pendorong orang tua untuk memiliki semangat menyekolahkan anak mereka. Disamping itu tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi jenis pekerjaan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk dapat memiliki kehidupan yang layak.

Jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi persepsi orang tua terhadap arti penting pendidikan bagi anak, karena dengan lingkungan pekerjaan yang rendah dan bahkan memerlukan ijazah mempengaruhi motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya karena mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dan mereka beranggapan bahwa sekolah itu hanya membuang waktu dengan percuma dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang mereka jalani.

Latar belakang pendidikan yang rendah akan berpengaruh dengan jenis pekerjaan orang tua sehingga dapat kita lihat bahwa

mayoritas pekerjaan orang tua responden adalah buruh tani. Pekerjaan ini tentulah tidak memerlukan ijazah dan dengan pekerjaan seperti ini membuat mereka hidup di lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sama. Lingkungan yang tidak mendukung, membuat rendahnya motivasi orang tua terhadap pendidikan anak dan memandang bahwa anak memiliki nilai ekonomis.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penyebab anak putus sekolah yang paling dominan dan dapat kita lihat bahwa faktor ekonomi sangat identik dengan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan anak-anak berhenti sekolah karena terlalu sibuk membantu orang tua bekerja, baik di rumah maupun mencari nafkah, meskipun tidak sepenuhnya bekerja mencari nafkah. Meskipun sudah ada kemudahan dari pemerintah berupa bantuan operasional siswa (BOS), akan tetapi untuk bersekolah anak juga tetap membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan seperti uang jajan sekolah, biaya transportasi ke sekolah.

Biaya lain yang kadang membuat anak dari kalangan tidak mampu menjadi tersisihkan dari interaksi sosialnya di sekolah seperti tidak mampu mengikuti gaya hidup teman-temannya, sehingga anak-anak dari keluarga miskin seringkali merasa malu datang ke sekolah dan akhirnya berhenti sekolah.

c. Faktor Sekolah

Faktor sekolah merupakan salah satu faktor eksternal penyebab anak putus sekolah. Faktor sekolah

yang dimaksud disini adalah faktor aksesibilitas yang masih sulit dijangkau seperti jarak ke sekolah dan cara menjangkau sekolah yang terlalu sulit akan mempengaruhi motivasi anak untuk sekolah karena semakin jauh jarak sekolah maka mereka akan memerlukan waktu dan biaya lebih untuk sampai ke sekolah.

d. Faktor Teman Sebaya

Teman sebaya adalah teman anak dalam kesehariannya atau bisa juga disebut teman bergaul. Teman bermain adalah salah satu orang terdekat anak disamping orang tua, saudara dan keluarga besar. Teman bermain memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan anak dan pola pikir anak terhadap suatu hal, teman bermain sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak disamping keluarga, teman bermain yang baik akan memberikan pengaruh yang positif bagi anak, begitu juga sebaliknya.

e. Kemampuan Akademis Siswa

Kemampuan anak dalam menangkap dan mengikuti pelajaran disekolah, merupakan kemampuan akademis anak disekolah. Anak yang mempunyai prestasi yang bagus akan mendapatkan rangking atau juara, namun anak yang kemampuan akademisnya kurang maka prestasinya biasa saja dan bahkan ada yang sampai tinggal kelas. Untuk melihat kemampuan akademis anak putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Prestasi Anak Putus Sekolah di Sekolah

No	Prestasi	Jumlah	Persen (%)
1.	Juara kelas	2	10
2.	Tidak juara kelas	10	50
3.	Tinggal kelas	8	40
jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan 2015

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas kemampuan akademis anak putus sekolah di Kecamatan Batang Cenaku yaitu biasa saja dengan jumlah 10 responden (50%). Prestasi anak yang biasa saja yang dimaksud disini adalah anak tidak meraih juara atau ranking tetapi anak dapat menuntaskan pelajaran disekolah dengan nilai yang mencukupi sesuai dengan standar kompetensi.

Rajin belajar dan membaca adalah salah satu cara agar dapat memperoleh nilai yang bagus, baik atau tidaknya prestasi disekolah ditentukan oleh seberapa sering anak mengulang pelajaran di rumah, rasa nyaman di sekolah dan guru yang disenangi, serta konsentrasi saat jam pelajaran disekolah berlangsung.

Anak-anak putus sekolah di Kecamatan Batang Cenaku berasal dari keluarga yang kurang mampu, pekerjaan orang tua yang hanya sebagai buruh atau tani dengan penghasilan rendah dan tidak menentu, mengharuskan anak untuk

ikut bekerja membantu orang tua baik di rumah maupun perekonomian keluarga sehingga waktu anak untuk belajar pun terganggu karena kelelahan dan pada akhirnya berdampak pada prestasi anak disekolah.

2. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah yang telah diuraikan di atas, menjadikan jumlah anak putus sekolah di Kecamatan Batang Cenaku masih memprihatinkan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kecamatan Batang Cenaku mencapai angka 249 anak. Hal inilah menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Batang Cenaku tentunya membutuhkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Adapun upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan anak putus sekolah antara lain: mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan bantuan dana, optimalisasi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan paket pendidikan.

a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu di bidang pendidikan tentunya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu yakni, Terwujudnya Pendidikan Unggul di Indragiri Hulu, Mengembangkan sistem pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keuletan anak didik pada segala jenjang, Membudayakan sekolah dalam rangka mewujudkan pelajar prima, Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, Mengembangkan nilai belajar berwawasan global dan berakar pada norma dan nilai budaya nasional, Menuntaskan wajib belajar, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penuntasan wajib belajar berbasis desa termasuk pemutakhiran datanya.

Salah satu indikator mutu pendidikan dilihat dari aspek peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah jika jumlah anak yang tidak dan atau putus sekolah khususnya jenjang pendidikan dasar mencapai 0%. Jika indikator ini menjadi kesepakatan, maka mesti ada upaya gerakan secara kolektif masyarakat dengan pemerintah untuk memberantas atau memerangi anak tidak dan atau putus sekolah. Berdasarkan pengamatan penulis, nampaknya permasalahan pendidikan terkesan menjadi tanggung jawab sekolah/pemerintah (itupun pemerintah sampai di tingkat

Kecamatan) sementara masyarakat dan pemerintahan khususnya tingkat desa tidak memiliki peran dalam menuntaskan anak tidak dan atau putus sekolah. Indikasi yang mudah dicermati adalah desa tidak memiliki data faktual dan terupdate terkait jumlah, sebaran, anak yang tidak dan atau putus sekolah. Demikian juga desa tidak memiliki mekanisme yang terstandar tentang bagaimana memetakan kondisi anak tidak dan atau putus sekolah mulai dari pendataan sampai penuntasannya.

Pemerintah desa dan segenap warganya mesti bertanggung jawab terhadap pembangunan bidang pendidikan khususnya meminimalkan anak putus dan atau tidak sekolah. Jika penuntasan anak putus dan atau tidak sekolah diaktualisasikan menjadi gerakan bersama berbasis desa, maka diharapkan semua elemen dalam masyarakat akan menjadikan anak yang tidak dan atau putus sekolah menjadi aib di desanya sehingga ada upaya menjadikannya sebagai musuh bersama.

Agar program pendidikan wajib belajar 9 tahun dapat berjalan sesuai rencana, pemerintah daerah memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat 1 yaitu penyelenggaraan pendidikan, maka dengan cara pengentasan anak putus sekolah.

b. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Selain mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi.

Banyaknya anak yang tidak dan putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat di atas melalui pendekatan tertentu oleh pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan. Begitu juga dengan faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat pendidikan yaitu, pendidikan belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, banyak anak-anak tidak memiliki latar pendidikan tetapi dapat hidup layak. Upaya mengatasi kondisi di atas, selain melakukan pembinaan maka pemerintah harus melakukan kampanye pendidikan berupa sosialisasi dan dialog tatap muka.

Selain itu, pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis terutama di bidang pemerataan dan perluasan akses, misalnya subsidi pendidikan gratis, penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Melalui sosialisasi ini

diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pembinaan dan pemberian motivasi terhadap masyarakat untuk memberikan kesadaran mengenai pentingnya bersekolah dilakukan oleh Bupati langsung pada saat melakukan kunjungan atau peninjauan kesetiap desa secara merata hingga ke pelosok desa.

c. Pemberian Bantuan Dana

Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Pendidikan) dan anggaran dana BOSDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) sebesar 1 milyar untuk kabupaten Indragiri Hulu.

Program tersebut tentunya sangat sesuai dengan arah kebijakan sektor pendidikan yang mengarah kepada peningkatan mutu serta revitalisasi pendidikan, dan memprogramkan penyebaran guru atau tenaga pendidik secara merata kesemua wilayah khususnya daerah terpencil.

Secara umum pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, membuat arah kebijakan pendidikan tersebut untuk memberi semangat dan ruang lingkup yang cukup luas agar dapat mengembangkan dirinya, potensi serta keterampilan yang dimilikinya agar dapat hidup mandiri ditengah masyarakat atau dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tanpa dipungut biaya.

d. Optimalisasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin

Dikatakan optimalisasi, karena secara faktual pemerintah sudah menggelontorkan kebijakan pemberian beasiswa. Permasalahannya adalah belum tepatnya sasaran, mekanisme, dan sistem pemberian dana. Oleh karenanya, perlu ada upaya pembenahan sistem pemberian beasiswa. Siapa, bagaimana caranya, dan untuk apa pemanfaatannya adalah beberapa hal yang mesti direvitalisasi.

Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi sekolah diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan yang selama ini masyarakat menganggap bahwa orang yang sekolah akan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dianggap menjadi orang yang sukses jika tidak menjadi PNS, maka anak yang sekolah hanya membuang tenaga, biaya dan waktu saja. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan berupa dana bagi masyarakat miskin dalam hal mengatasi beban masyarakat terhadap biaya pendidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang menyajikan hasil penulisan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan 5 kasus yang ditemukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa: faktor-faktor

yang menjadi penyebab anak putus sekolah antara lain:

- a. Faktor Keluarga
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Sekolah
- d. Faktor Teman Sebaya
- e. Kemampuan Akademis

2. Upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan anak putus sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar berbasis desa termasuk pemutakhiran data anak putus dan atau tidak sekolah.
- b. Sosialisasi Kepada Masyarakat
- c. Pemberian Bantuan Dana
- d. Optimalisasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin
- e. Program Bantuan Paket Pendidikan

Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tegas yang bersifat pemberian sanksi terhadap anak yang putus dan atau tidak sekolah sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah, sehingga kedepannya para masyarakat menjadi jera karena tidak mengikuti proses pendidikan formal.

2. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap daerah secara merata. Data ini, kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam pengentasan anak putus sekolah.

3. Pemerintah daerah perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah hingga ke pelosok serta daerah yang terpencil secara berkelanjutan.

4. Pemerintah daerah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengentasan anak putus sekolah secara terprogram dan berkelanjutan seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan semua pihak yang terkait mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengentaskan anak putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Keempat. Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2003. *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbun dan M. Mahfud. 2000. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Musfiquon. 2007. *Menangani Putus Sekolah*. Rianeka Cipta. Jakarta.
- Nasution. 2009. *Sosiologi pendidikan*. Bumi Aksara, jakarta

Nitisemito, S. 1998. *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Cetakan ketujuh. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Syarifudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. jurnal pro justisia edisi IV. Bandung. Universitas Parahyangan.

Syaukani, HR. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Setiawan, Fendik, M. 2001. *Solusi Mengurangi Anak Putus Sekolah Wajib Belajar 9 Tahun*. Jurnal. <http://makalahcentre.blogspot.com/2011/01/anak-putus-sekolah.html> (akses 29-09-2014).

Tirtarahardja, Umar. 2010. *Pengantar Pendidikan*. Cetakan kedua. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional